

KONFLIK DAN PERDAMAIAN

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

KONFLIK DAN PERDAMAIAN

Penulis:

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

Ilustrasi Sampul: Thinkstock

Cetakan I: Juli 2019

ISBN: 978-602-5758-66-9

Penerbit

CV Saga Jawadwipa

PUSTAKA SAGA

Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima, no 4A. Kenjeran, Surabaya

Email: saga.penerbit@gmail.com, HP: +62 856 5539 6657

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Konflik dan perdamaian ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada konflik yang tidak dibarengi upaya perdamaian, dan sebaliknya upaya perdamaian tidak otomatis bebas dari konflik. Buku ini mencoba memahami konflik dan perdamaian dari perspektif ilmu sosial.

Pada bagian awal, buku ini membahas konflik dan perdamaian sebagai suatu proses sosial, definisi konflik dan pelbagai jenis konflik (ekonomi, politik, budaya, agama, etnik), indikator konflik, serta fungsi konflik. Selanjutnya dibahas perdamaian (resolusi konflik) dari perspektif Durkheim Weber, Derrida, Armstrong, Girard, dll. Resitasi berdasar tulisan Schwager, Gandhi, King. Jr, Hooks, Suu Kyi, dan Sharp dicantumkan untuk mempertajam perspektif memahami konflik dan perdamaian.

Semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca dan merupakan awal bagi diskusi lanjutan tentang konflik dan perdamaian.

Surabaya, 10 Juli 2019

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | iii

Daftar Isi | iv

1. Proses Sosial : Konflik dan Perdamaian | 1
2. Konflik | 7
3. Perdamaian | 21
4. Agama Sebagai Fondasi Etika Untuk Mengatasi Konflik/Kekerasan |25
5. Ahimsa : Jangkauan dan Kekuasaan Nir-Kekerasan Suatu Kutipan Tulisan Mahatma Gandhi | 44
6. Cinta Kasih, Hukum dan Ketidaktaatan Masyarakat |66
7. Beloved Community (Masyarakat Tercinta) : Sebuah Dunia Tanpa Rasisme |80
8. Bebas Dari Rasa Takut | 94
9. Di Balik Perang Berkeadilan dan Paham Perdamaian : Perjuangan Tanpa Kekerasan Menuju Keadilan, Kebebasan dan Perdamaian | 102

Daftar Pustaka | 143

Riwayat Hidup | 147

Proses Sosial : Konflik dan Perdamaian

1. Proses Sosial

Setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu hingga dapat menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku disebut proses sosial. Mengetahui struktur masyarakat hanya mengetahui segi statis masyarakat, akan tetapi mengetahui proses sosial memungkinkan memahami segi-segi dinamis masyarakat.

Ada dua tipe proses sosial yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif terjadi apabila proses ini mengindikasikan adanya gerak pendekatan penyatuan. Sedangkan proses sosial disosiatif terjadi apabila mengindikasikan adanya gerak pembentukan atau perpecahan. Proses sosial asosiatif mengintegrasikan masyarakat (memperdamaikan) sedang proses sosial disosiatif berupa pertentangan sosial (konflik).

2. Konflik

Proses sosial disosiatif berupa pertentangan sosial mencakup kompetisi dan konflik. Kompetisi dan konflik memegang peranan dalam mencapai status (*achieved status*).

a. Kompetisi

Merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Ada dua tipe kompetisi yaitu kompetisi personal / rivalita dan kompetisi impersonal.

Kompetisi atau persaingan terjadi dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan.

Akibat persaingan bisa positif atau negatif.

Positif :

1. Menyalurkan keinginan/kepentingan
2. Merealisasi keinginan/kepentingan, memberikan kedudukan/peranan sosial yang tepat
3. Terdapat pembagian kerja yang efektif
4. Mematangkan kepribadian
5. Memperluas pandangan/pengertian
6. Mendorong kerja keras untuk mencapai kemajuan

Negatif :

1. Timbul disorganisasi dalam struktur sosial
2. Perubahan yang terlalu cepat sukar diikuti oleh seluruh masyarakat
3. Bila timbul emosi, rasa benci dan marah bisa mengakibatkan konflik

b. Konflik

Proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Dapat dibedakan antara konflik *overt* (terang-terangan) dan konflik *latent* (tersembunyi). George Simmel membedakan empat jenis konflik yaitu :

1. Perang antar kelompok
2. *Fend* (pembalasan dendam) dan perjuangan antara dua aliran
3. Konflik dalam bidang hukum untuk mempertahankan hak-hak kekayaan

4. Konflik cita-cita

Faktor penyebab :

1. Perbedaan pendirian / keyakinan
2. Perbedaan kebudayaan
3. Perubahan sosial

Bentuk konflik :

1. Pertentangan pribadi
2. Pertentangan rasial
3. Pertentangan antara kelas sosial
4. Pertentangan politik
5. Pertentangan internasional

Akibat konflik :

1. Memperbesar solidaritas kelompok
2. Menggoyahkan persatuan
3. Merubah kepribadian
4. Kehancuran
5. Dominasi
6. Akomodasi (kesepakatan)

3. Perdamaian

Proses sosial asosiatif yang mengintegrasikan (memperdamaikan) masyarakat dapat dilihat dalam bentuk

:

- a. Kooperasi / kerjasama
- b. Akomodasi
- c. Asimilasi
- d. Amalgamasi

a. Kooperasi

Kooperasi ialah perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerjasama dalam suatu kesepahaman. Motifnya sering tertuju untuk kepentingan diri pribadi.

Bentuk-bentuk kooperasi ialah :

1. *Bargaining* (tawar menawar) : pencapaian kesepakatan untuk pertukaran barang atau jasa
2. *Cooptation* : kerjasama untuk menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk
3. *Coalition* : kerjasama dua organisasi yang berbeda struktur untuk tujuan yang sama
4. *Joint venture* : usaha kerjasama demi keuntungan bersama dengan saling mengisi kekurangan masing-masing

b. Akomodasi

Proses tercapainya kesepakatan yang bersifat sementara yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Akomodasi tidak dapat menyelesaikan secara tuntas untuk selamanya (hanya sekedar mengendalikan konflik). Dalam proses akomodasi kedua belah pihak tetap memegang teguh pendapatnya (kesepakatan untuk saling tidak sepakat).

Tujuan :

1. Mengurangi pertentangan yang timbul antara perorangan atau kelompok
2. Mencegah pertentangan untuk sementara

3. Untuk memungkinkan kerjasama antar kelompok yang terpisah dalam masyarakat
4. Mengusahakan peleburan antar kelompok yang terpisah dalam masyarakat
5. Mengusahakan peleburan kelompok-kelompok sosial melalui asimilasi

Bentuk akomodasi :

1. *Coercion*, dengan cara paksaan dan mengancam sanksi
2. *Compromise*, dengan cara mengusahakan pendekatan
3. *Mediation*, mengusahakan pendekatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral
4. *Arbitrasi*, dengan mempergunakan pihak ketiga sebagai penengah yang membuat keputusan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Pihak ketiga berhak memutuskan
5. *Adjudication*, dengan mempergunakan pihak ketiga yang berwenang
6. *Toleration*, akomodasi tanpa menghasilkan persetujuan formal
7. *Stalemate*, pertentangan berhenti karena kekuatannya seimbang dan mengalami kemacetan

c. Asimilasi

Merupakan proses peleburan kebudayaan menjadi kebudayaan tunggal.

Proses asimilasi muncul :

1. Bila ada perbedaan kebudayaan
2. Bila kelompok yang berbeda selalu bergaul secara intensif
3. Masing-masing pihak saling menyesuaikan kebudayaannya

Faktor penunjang asimilasi :

1. Sikap dan kesediaan menenggang
2. Sikap menghadapi orang asing beserta kebudayaannya
3. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang
4. Sikap terbuka golongan penguasa/tidak diskriminasi
5. Kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan
6. Perkawinan campuran
7. Musuh bersama dari luar

Faktor penghambat :

1. Terisolasinya kebudayaan
2. Kurangnya pengetahuan
3. Perasaan takut kepada kekuatan kebudayaan lain
4. Perasaan superior
5. Perbedaan ciri badaniah antar kelompok
6. Adanya perasaan *in group* yang kuat
7. Adanya gangguan-gangguan diskriminatif
8. Perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi antar warga dan antar kelompok

d. Amalgamasi

1. Proses sosial yang melebur dua kelompok budaya
2. Dapat menghasilkan sesuatu yang baru
3. Melenyapkan pertentangan di dalam kelompok

2

Konflik

1. Definisi

Konflik adalah proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Sebagai proses sosial, maka konflik merupakan gejala yang serba hadir. Artinya, selama ada manusia pastilah ada konflik.

2. Jenis-Jenis Konflik

Konflik bisa dibedakan berdasarkan jenisnya :

a. Konflik internal dan eksternal

Konflik internal terjadi di dalam suatu komunitas, dan konflik eksternal terjadi apabila melibatkan beberapa komunitas.

b. Konflik overt dan latent

Konflik bisa terjadi secara terbuka (overt) maupun tersembunyi (latent)

c. Konflik horizontal dan vertikal

Konflik horizontal dipahami sebagai pertentangan yang bertalian dengan suku, etnik, dan agama. Konflik vertikal melibatkan perbedaan ekonomi dan politik

d. Konflik juga bisa dibedakan berdasarkan bidangnya, seperti konflik ekonomi, konflik politik, konflik budaya, konflik agama, konflik etnik, konflik pendidikan, dst.

3. Konflik Ekonomi

Konflik ekonomi menurut Karl Marx, terjadi ketika ada pertentangan antara kelas yang memiliki (borjuis) dengan kelas yang tidak memiliki (proletar). Konflik berakar dari persoalan ekonomi sebagai sub-struktur atau basis ekonomi. Basis ekonomi ini meliputi hubungan produksi (tuan tanah - buruh tani, tuan-hamba, pemilik pabrik-buruh, dst) serta sarana dan prasarana produksi (tanah, budak, mesin, dst). Basis ekonomi inilah yang menentukan super-struktur seperti hukum, pendidikan, agama, dst yang non-ekonomi. Sub-struktur mempengaruhi super-struktur.

Menurut Marx, sejarah kehidupan manusia dimulai dengan konflik dan diakhiri dengan konflik. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan bersifat bipolar. Selama ada manusia selalu ada konflik.

4. Konflik Politik

Menurut Dahrendorf, konflik bertalian dengan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya bertindak sesuai dengan keinginannya. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah atau ada legitimasi. Itulah konflik politik.

Konflik politik tidak pernah tunggal (*super imposed*) dan terjadi akumulasi. Berbagai kelompok (semu maupun nyata) dengan pelbagai kepentingan bisa terlibat dalam suatu konflik politik.

5. Konflik Budaya

Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi pikiran manusia, sehingga orang itu tidak sadar sedang dikuasai. Antonio Gramsci dalam *Prison Notebook* menyebutnya dengan istilah hegemoni atau dominasi budaya.

Konflik budaya terjadi ketika nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan nilai lama yang dianut oleh sebagian masyarakat lainnya. Tulisan Ivan Illich “Bebas dari sekolah”, Paolo Freire “Pendidikan bagi orang yang tertindas” adalah contoh dari konflik budaya.

6. Konflik Agama

Emile Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life* membahas masyarakat primitif yang homogen dan percaya kepada banyak Tuhan. Pada masyarakat primitif, konflik terjadi diantara Tuhan-Tuhan tersebut. Sebaliknya pada masyarakat modern yang heterogen dan percaya kepada satu Tuhan, pelaku konflik adalah masyarakat itu sendiri, yang memperebutkan satu Tuhan. Penyebab konflik adalah karena penganut agama tidak pernah belajar langsung kepada Tuhannya, melainkan melalui perantara / broker agama.

Max Weber dalam *Sociology of Religion* membedakan dua komponen agama yaitu *ethics* atau perintah Tuhan dan *magics / politics* berupa manipulasi perintah Tuhan untuk kepentingan manusia. Konflik agama lebih banyak pada persoalan *magics / politics* dibanding *ethics*.

7. Konflik Etnik

Konflik etnik bertalian dengan perbedaan asal-usul suatu ras (yang bersifat biologik) lalu berlanjut ke persoalan etnik (yang bersifat kultural). Contoh orang Madura di Pulau Madura menyebut dirinya orang Madura asli (Kelas I), dan lebih utama dibanding orang Madura yang merantau (pendalungan). Sebaliknya orang Madura yang merantau merasa lebih beradab, sehingga muncullah sebutan toron dan onggah. Toron atau turun, ketika mereka kembali dari perantauan ke Pulau Madura. Onggah atau naik, ketika mereka berangkat dari Pulau Madura ke daerah perantauan.

Persoalan etnik Tionghoa di Indonesia cerminan dari konflik etnik. Asal usul, kebiasaan, bahasa, dst yang berbeda secara etnik acapkali meruak jadi konflik etnik.

8. Indikator Konflik

Ada beberapa indikator konflik yaitu :

a. Demonstrasi

Demonstrasi adalah menyampaikan protes / ketidaksetujuan sebagai reaksi terhadap kebijakan publik. Demonstrasi sebagai bentuk pernyataan pendapat adalah hak asasi manusia.

Demonstrasi bukanlah berasal dari masyarakat barat, karena masyarakat tradisional di Indonesia pun mengenal demonstrasi. Misalnya budaya pepe di Jawa Tengah sebagai pernyataan pendapat atas kebijakan sultan. Hal serupa juga terjadi di kesultanan Buton, ketika masyarakat menyatakan pendapat untuk mengangkat dan atau keberatan terhadap sultan.

b. Riot / kerusuhan

Demonstrasi acap kali berubah menjadi kerusuhan. Penyebabnya, masyarakat butuh akses terhadap penguasa namun saluran hukum untuk akses tersebut buntu. Masyarakat menggunakan kerusuhan untuk berkomunikasi dengan penguasa. Juga tidak ada mekanisme penyelesaian konflik antar elit. Kerusuhan sebagai produk dari reproduksi kekerasan penguasa yang eksekutif.

c. Kekerasan

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi jika realisasi aktual berada di bawah realisasi potensial. Kita mempunyai kemampuan tertentu yang bisa direalisasikan. Namun pada kenyataannya kita tidak bisa merealisasikannya.

9. Fungsi Konflik

Lewis Coser dalam *The Function of Social Conflicts* menyebutkan konflik memiliki fungsi yaitu :

- a. Sebagai katup penyelamat untuk membersihkan kekacauan
- b. Indikator kekuatan dan stabilitas hubungan
- c. Memperkuat kohesi internal
- d. Tidak selalu berakhir dengan permusuhan
- e. Terakumulasi dalam interaksi lainnya

10. Masalah Integral Nasional : Empat Bidang Konflik

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (1988) dewasa ini disamping berita-berita tentang usaha-usaha dan keberhasilan-keberhasilan usaha membina kesatuan dan

persatuan bangsa, surat-surat kabar di Indonesia banyak pula dipenuhi oleh berbagai berita tentang masalah yang diperkirakan akan mungkin mengganggu kesatuan dan persatuan itu. Masalah-masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori ialah :

1. Masalah suku dan ras. Masalah suku dan ras pada dasarnya lebih merupakan masalah kultural daripada merupakan masalah biologik yang bersifat alami itu. Sekalipun sejak awal-mula kenyataan menunjukkan bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu telah menghadapkan orang pada pilihan untuk segera melupakan identitas dirinya sebagai anggota suku atau anggota ras namun masalah suku dan ras ini (karena berakar pada persoalan kultur) tidaklah akan lenyap begitu saja. Di Indonesia masalah ras dalam kerangka integrasi nasionalpun sering dipersulit oleh permasalahan yang pada dasarnya bersifat ekonomik.
2. Masalah daerah dan antar daerah, meliputi pula masalah hubungan antara kota dan desa. Masalah daerah dan kedaerahan semula berbaur dengan permasalahan suku tetapi sekarang lebih menampakkan diri sebagai permasalahan ekonomi. Masalah daerah lalu berkembang juga secara politis sebagai masalah dalam hal pembagian pendapatan atau imbalan ekonomik.
3. Masalah integrasi fungsional antara berbagai sektor kegiatan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya bisa pula dikembalikan pada persoalan persaingan dalam hal pembagian imbalan ekonomik, tetapi lebih terlihat sebagai kesatuan okupasional daripada kesatuan-

kesatuan teritorial. Masalah ini dapat pula berkembang menjadi masalah yang gawat yang (apabila menimbulkan situasi disfungsional di dalam sistem) akan pula bisa memecah kesatuan bangsa.

4. Masalah konflik antar golongan kaya dan golongan miskin. Sebagai akibat masalah 2 dan 3. Di Indonesia masalah ini seringkali diwarnai pula oleh warna-warna rasial khususnya apabila masalah itu timbul dalam persoalan hubungan antara sektor-sektor kegiatan ekonomik. Berbeda dengan masalah konflik antar daerah dan konflik antar kelompok okupasi ketegangan dan konflik yang terjadi antara si kaya dan si miskin itu sebenarnya merupakan konflik antar kelompok-kelompok yang tak berorganisasi. Dengan demikian konflik-konflik itu jarang bersifat terbuka dan hanya terpendam bagai api dalam sekam (untuk sekali-kali menyala keluar). Akan tetapi justru karena itulah konflik-konflik tersebut (apabila sampai terjadi) akan sulit untuk segera dapat dideteksi, diidentifikasi dan dikendalikan.

11. Konflik Horizontal Di Jawa Timur

- a. **Konflik horizontal** dipahami sebagai pertentangan yang bertalian dengan suku, etnik, dan agama. Di Jawa Timur konflik horizontal telah terjadi berulang kali, misalnya Peristiwa 9696 (kerusuhan Surabaya Utara, 9 Juni 1996), dan peristiwa 1010 (kerusuhan Situbondo, 10 Oktober 1996), dan pembantaian dukun santet.

Berbeda dengan konflik vertikal yang menggunakan parameter kuantitatif, seperti ekonomi,

yang lebih mudah dikompromikan; maka konflik horizontal dengan parameter kualitatif seperti suku, etnik, dan agama, lebih sulit untuk dikompromikan. Persoalan ekonomi lebih memungkinkan untuk dicari titik-temu lewat proses tawar-menawar, karena ukurannya kuantitatif dan jelas. Sedangkan persoalan suku, etnik, dan agama, sulit dicari titik-temu, karena *public good* bagi satu komunitas artinya menjadi *public bad* bagi komunitas lainnya. Konflik horizontal ini yang acapkali muncul karena para pihak merasa terancam seperti bola salju yang bergulir, semakin lama semakin besar dan sulit dihentikan.

- b. Konflik horizontal secara fisik ataupun simbolik bisa terjadi **inter dan antar masyarakat**. Contoh konflik horizontal inter masyarakat adalah ketika orang Madura di Pulau Madura menyebut orang Madura di daerah tapal kuda dengan sebutan *pendalungan*, dan sebaliknya, ketika orang Madura dari daerah tapal kuda menyebut pulau ke Pulau Madura dengan istilah *toron*. Sebutan tersebut terasa menyakitkan bagi yang memahaminya.

Konflik horizontal antar masyarakat seperti terjadi di Situbondo, disamping ada persoalan politik, juga karena terjadi segregasi sosial. Orang Tionghoa, pedagang, beragama Kristen : terpisah dari orang Madura, petani/nelayan, beragama Islam (NU); terpisah dari orang Jawa, pegawai negeri, beragama Islam (Muhammadiyah). Tidak ada *cross-cutting affiliation*.

Kenyataan berbeda terjadi di Sumenep. Pengalaman sejarah, ikatan kultural, jaringan perekonomian telah mempertautkan orang Madura dan orang Tionghoa di Sumenep.

- c. Beberapa laporan penelitian (Santoso, 2002; Inpedham - LIN, 2003) membedakan konflik horizontal di Jawa Timur berdasar segmentasi sosio-kultur dan wilayah geografis : a. Perkotaan (misal: Surabaya), b. Mataraman (misal: Madiun, Ngawi, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Blitar), c. Tapal kuda (misal: Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Jember). Kesimpulannya, konflik horizontal lebih sering terjadi di daerah tapal kuda.

Dari penelusuran sejarah tampak bahwa daerah **tapal kuda** merupakan ajang konflik horizontal. Misalnya, ketika Islam masuk Pulau Jawa lewat Demak (1293) “hanya membutuhkan waktu 30 tahun” untuk menyebarkan ajarannya di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur. Daerah tapal kuda membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi Islam. Selama berabad-abad daerah tapal kuda (Pasuruan, Panarukan, Situbondo) tercatat dalam sejarah menjadi ajang konflik horizontal. Sejarah juga menunjukkan bahwa masyarakat tapal kuda adalah komunitas yang sangat fanatik terhadap agama yang dianutnya, sekaligus memiliki kecenderungan nativis, yakni enggan menerima pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya mereka yang terbentuk oleh latar sejarah mereka yang penuh diwarnai pertentangan

inter dan antar agama serta rekayasa politik. Konflik horizontal tampaknya begitu menyebar dan mengakar dalam kehidupan masyarakat daerah tapal kuda.

- d. Konflik horizontal juga tidak lepas dari peran negara. Masyarakat butuh akses untuk mempengaruhi kebijakan negara, karena nasibnya ditentukan negara. Seandainya akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka tersedia, maka masyarakat akan menempuh mekanisme tersebut. Namun sistem politik Indonesia tidak seperti itu. Akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka nyaris tidak ada, oleh karena itu masyarakat berupaya cari akses tersebut walaupun inkonstitusional, ilegal sporadik dan tertutup. Reformasi yang digulirkan mahasiswa ternyata hanya mengubah mekanisme yang tertutup - *hidden transcript* - menjadi terbuka, tetapi tetap sulit memproses lewat jalur konstitusional, legal, dan institusional. Jadi kekerasan bukan berakar dari massa saja atau negara saja, tetapi ada proses dialogis antara negara dan massa.

Negara adalah satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan lewat aparaturnya, seperti militer, polisi, dan peradilan. Kekerasan dilegitimasi negara untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti dinyatakan Arendt, kekerasan akan muncul bilamana kekuasaan sedang ada dalam bahaya, yang berarti bahwa meskipun kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan, namun kekerasan tidak mampu menciptakan kekuasaan. Pada awalnya kekerasan tersebut langsung

dilakukan oleh negara. Namun dengan merebaknya isu hak asasi manusia, maka negara (rezim) tidak cukup menggunakan aparaturnya sebagai pemaksa, tetapi juga melibatkan masyarakat. Benih kekerasan telah merebak di masyarakat lewat pengorganisasian kriminal, bukan organisasi kriminal. Negara telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan kekerasan.

Sistem politik demokrasi mengenal mekanisme penyelesaian konflik yang jelas lewat dukungan suara. Di Indonesia, mekanisme tersebut digunakan pada saat pemilihan umum. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ada pelembagaan politik yang mampu mengelola konflik antar elit dan belum ada kriteria yang jelas tentang konflik elit. Salah satu akibat dari konflik antar elit adalah merebaknya kekerasan yang melibatkan para pendukung. Kekerasan akan semakin intens dan sulit dikelola apabila pihak yang terlibat konflik mempolitisir ideologi dan atau agama.

- e. Ada empat hal yang mempertautkan konflik horizontal, kekerasan, politik dan agama. **Pertama**, agama semestinya tidak menimbulkan konflik horizontal dan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan konflik horizontal dan kekerasan apabila berhubungan dengan faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama prophetis (nabi), seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan

kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama prophetis cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasi merupakan salah satu alasan yang mendasari konflik horizontal dan kekerasan. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Kekerasan telah dibingkai “agama” sebagai ekspresi keinginan untuk menetralsir dosa. **Kedua**, agama telah mengalami simplifikasi, politisasi, mobilisasi, dan dibuat transenden sehingga terjadilah komunalisasi politik-agama : “agama bernilai lebih tinggi dibanding agama lain dan hukum nasional/internasional”. **Ketiga**, orang beragama punya afiliasi agama dan juga kepentingan politik, sehingga bisa terjadi pertentangan dengan komunitas agama lain di wilayah geografis yang sama. **Keempat**, ambivalensi agamawan sebagai *peacemaker* sekaligus *violencemaker*.

- f. Konflik horizontal merupakan **tragedi kemanusiaan**. Lihat saja Peristiwa 9696, Peristiwa 1010, pembantaian dukun santet, dan sejenisnya. Korbannya - biasanya dari kalangan minoritas - acapkali orang-orang dari lapisan bawah, tidak berdosa, atau sama sekali tidak tahu menahu dengan persoalan yang diperjuangkan oleh para pihak yang berkonflik.

Pertautannya dengan manusia dan kemanusiaan menyebabkan konflik horizontal harus

dikaji secara holistik. Dari jumlah pelaku, misalnya, konflik horizontal bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok yang terorganisir. Dilihat dari pendanaan, bisa saja konflik horizontal dibiayai oleh para pihak sendiri atau melalui aliran dana bank dari pihak lain, dari dalam atau luar komunitas yang bersangkutan.

Bertumpu pada gagasan di muka,antisipasi terhadap konflik horizontal haruslah dilakukan lewat kerjasama yang baik dari semua elemen manusia. Agama bisa saja menjadi sentra kerjasama tersebut. Namun perlu dicatat bahwa agama akan berhasil menyelesaikan konflik eksternal dengan resolusi non-kekerasan, jika konflik internal agama diselesaikan dengan cara yang non-kekerasan pula. Pada kenyataannya agama cenderung melakukan paksaan dan kekerasan terhadap para pembangkangnya. Sejarah telah membuktikan bahwa agama belum lulus dalam resolusi non-kekerasan menghadapi pembangkangnya sendiri.

Ambivalensi adalah kata kunci untuk memahami konflik horizontal. Ambivalensi telah terjadi dalam pemahaman kehidupan suku, etnik, dan agama. Pemahaman agama yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian kenyataannya berhadapan dengan pemahaman agama yang menjadi sumber kekerasan. Perilaku agamawan yang memiliki wajah ganda, yaitu di satu sisi bertindak selaku *peacemaker*, namun pada sisi lain berubah menjadi *violencemaker* perlu dikikis. Ambivalensi para pelaku kekerasan terhadap nilai internal dan eksternal dan saling

keterkaitannya dengan konflik horizontal dalam ranah ketidakmenentuan antara hukum dan kekerasan. Yang mengganggu perasaan serta menjadi landasan pemikiran menggunakan cara kekerasan adalah parsialitas mereka terhadap komunitas mereka sendiri, dan ketidakpedulian mereka terhadap perasaan komunitas lain.

Sudah saatnya agama yang satu bekerjasama dengan agama lain yang memiliki komitmen sama terhadap keadilan, kebebasan, dan perdamaian, serta kesediaan untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan prinsip moral dan martabat manusia. Setiap agama memiliki tanggungjawab yang sama untuk memerangi konflik horizontal.

Dalam ikhwal konflik horizontal, ada pihak dianggap sebagai penyerang. Mereka sangat terlatih dalam praktek kekerasan, yang selalu siaga untuk menggunakan kekerasan, dan dianggap sebagai pahlawan oleh komunitasnya. Oleh karena itu langgengnya konflik horizontal dan kekerasan bukanlah konflik alami dan terelakkan. Kita bisa menyeleksi tempat dimana konflik horizontal serta kekerasan terjadi dan tidak terjadi di masa lalu, membandingkannya berdasarkan berbagai kriteria demografis dan ekologis, dan kemudian membuat hipotesis atau sekumpulan hipotesis untuk memperkirakan mengapa konflik horizontal serta kekerasan terjadi di beberapa tempat tetapi tidak ditempat lain.

3

Perdamaian

Perdamaian atau resolusi konflik dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Tidak ada suatu cara yang dapat menyelesaikan semua konflik. Setiap konflik punya keunikan tersendiri.

Resolusi konflik yang lazim dilakukan ialah :

1. Emil Durkheim menyatakan masyarakat yang terikat secara tali temali (*Cross-Cutting Affiliation*) cenderung damai dan punya daya tahan terhadap konflik. Sedangkan masyarakat yang tidak ada *cross-cutting affiliation* cenderung terlibat dari suatu konflik ke konflik lainnya. Contoh, masyarakat Sumenep dan Situbondo yang mayoritas suku Madura. Di Sumenep hampir tidak terjadi konflik, karena ada ikatan tali temali antara orang Madura dan orang Tionghoa. Secara historis, nenek moyang mereka campuran Madura dan Tionghoa. Putri Koneng, ibu dari Jokotole, adalah orang Tionghoa. Di Keraton Sumenep sampai sekarang masih bisa dilihat ukiran naga dan burung phoenix, artinya ada pertalian budaya Madura dan Tionghoa. Sebaliknya di Situbondo acapkali terjadi konflik (pembangunan jalan Anyer-Panarukan, Perang Blambangan, kerusuhan 10 Oktober 1996, dsb). Hal ini disebabkan Situbondo tidak ada *cross-cutting affiliation*. Ada orang Madura, Islam NU, petani atau nelayan. Ada orang Jawa, Islam Muhammadiyah, pegawai negeri. Ada orang

Tionghoa, Kristen, pedagang. Jadi ada segregasi etnis/suku, agama, dan mata pencaharian.

Menurut Durkheim, masyarakat yang memiliki *cross-cutting affiliation* akan berlanjut pada *cross-cutting loyalties*. Pada gilirannya masyarakat seperti ini akan berada dalam situasi damai.

2. Menurut Max Weber, agama seharusnya menjadi sentra / pusat perdamaian. Namun di dalam agama terdapat unsur yang disebut *magics / politics* yang memanipulasi perintah Tuhan untuk kepentingan manusia. Agama menjadi salah satu sumber konflik, karena semua agama hanya belajar dari “broker” agama, bukan langsung dari Tuhan. Agama sebenarnya telah gagal menyelesaikan konflik. Agama hanya akan bisa menciptakan perdamaian apabila agama tersebut bisa meredam konflik dalam agamanya sendiri tanpa kekerasan. Bahkan pemuka agama yang seharusnya menjadi *peacemaker*, malah menjadi *violencemaker*. Agama bisa menjadi resolusi jika agama berbicara tentang hubungan horizontal. Misalnya integritas, demokrasi, hak asasi manusia, dst. Agama dalam batas-batas tertentu bisa membuat jejaring untuk perdamaian.
3. Apabila terlibat dalam konflik, kita cenderung menyalahkan pihak lain / *the others*. Padahal menurut Jacques Derrida, konflik sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri / *the self*. Jadi perdamaian harus bermula dari diri kita sendiri. Ada kecenderungan dalam suatu konflik tingkat rasionalitas para pihak menurun. *The self* dan *the others* sama-sama kurang rasional.

4. Karl Armstrong menyatakan perdamaian berkaitan dengan *compassion*. Kita harus belajar berbelas kasih sejak dini. Kita harus menepi dari diri kita, apa yang membuat diri kita sakit, jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Resolusi konflik atau perdamaian dimulai dari diri kita sendiri.
5. Perdamaian dalam perspektif Rene Girard dapat diciptakan lewat kultur tanpa dendam (sikap tidak menyimpan dendam), tanpa kambing hitam (menyalahkan pihak lain), tanpa ketakutan, dan tanpa ancaman kekerasan. Perspektif ini diterapkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Mandela yang pernah di tahan puluhan tahun oleh lawan politiknya, namun ketika bebas dan terpilih jadi pimpinan / Presiden di Afrika Selatan, Mandela tidak membalas dendam kepada lawan politiknya. Mandela bisa menyelesaikan konflik di Afrika Selatan dengan kultur tanpa dendam. Adalah hal yang pantas Mandela memperoleh Nobel Perdamaian.
6. Dalam *social capital*, perdamaian di masyarakat dapat tercipta lewat memperkuat modal sosial berupa kepercayaan, jaringan dan norma sosial. Menurut Francis Fukuyama, masyarakat yang dibangun atas dasar kepercayaan (seperti Italia Utara) lebih mudah membangun perdamaian, pemerintah yang bersih, dan partisipasi sosial yang tinggi. Sebaliknya masyarakat yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan (seperti Italia Selatan) sarat dengan konflik, pemerintahan korup, dan partisipasi sosial yang rendah.

Robert Putnam dalam buku *Bowling Alone* menjelaskan pentingnya jaringan pengikatan (*bonding social capital*) dan jaringan pen jembatanan (*bridging social capital*). Jaringan pengikatan berupa ikatan primordial seperti kesamaan suku, etnis dan agama. Sedangkan jaringan pen jembatanan berupa hubungan antar komunitas yang berbeda. Memperkuat jaringan-jaringan sosial ini diyakini akan mempermudah perdamaian.

Akhirnya, norma sosial juga bisa memperkuat modal sosial. Norma sosial yang mendukung perdamaian haruslah dipertahankan, dan sebaliknya norma sosial yang mengarah kepada perpecahan harus dihindari bahkan ditiadakan.

Agama Sebagai Fondasi Etika untuk Mengatasi Kekerasan^{*)}

Dunia agama sangat bervariasi dan berhubungan dengan fenomena kekerasan dalam banyak cara. Karena itu, tidak ada jawaban sederhana atas pertanyaan bagaimana agama bisa menjadi dasar etika untuk mengatasi kekerasan. Bahkan ada pertanyaan sebelumnya: apakah agama-agama ingin mengatasi kekerasan? Tuhan, *deities* atau dewa seringkali tampak sebagai kekuatan yang membinasakan atau menghancurkan dan mereka sering kali menghasut umatnya untuk membunuh orang lain. Sehingga Yahweh memerintahkan orang-orangnya yang dia keluarkan ke Mesir agar membunuh tujuh orang di Palestina (Deut 7.1-26), dan dalam Bhagavadgita, batara guru Krishna memerintahkan Arjuna dengan tegas, yang sebenarnya tidak ingin melawan kaum kerabatnya sendiri, agar berperang: 'Jika kamu kalah, kamu akan memenangkan langit. Tetapi jika kamu menang, kamu akan memperoleh bumi. Karena itu, wahai anak Kunti, berperanglah dengan gagah' (II, 37). Dalam prakteknya, ada banyak perang 'suci' dalam semua agama, dan gagasan-gagasan serupa mempengaruhi dunia Barat belakangan ini. Apakah agama-agama yang para pemeluknya menemukan kepercayaan

^{*)} Resitasi berdasar tulisan Raymond Schwager, *Religion as the Foundation of an Ethic of Overcoming Violence*, dalam Wim Beuken and Karl - Josef Kuschel, *Religion as a source of Violence*, London, SCM Press, 1997, P.P.119-128

spiritual tertinggi pada saat yang sama mendorong agar umatnya melakukan kekerasan?

1. Tatanan Publik/Ketertiban Masyarakat

Apakah agama-agama dianggap sebagai kekuatan untuk mengadakan perdamaian atau sebagai kekuatan yang agresif umumnya bergantung pada bagaimana anda memperkirakan kemampuan manusia untuk hidup bersama secara damai. Jika anda percaya kemampuan ini cukup besar, maka anda spontan akan mengkaitkan banyak tindak kekerasan dan peperangan dengan kekuatan gelap yang dengan kekuatan ini pria dan wanita yang suka perdamaian disesatkan. Dalam hal ini, agama-agama memiliki kekuatan besar yang mengancam. Pandangan demikian mengilhami Pencerahan Eropa. Setelah terjadi pengalaman yang amat pahit akibat peperangan agama, orang-orang kemudian berpikir bahwa kiranya sangat penting untuk menekan agama-agama dari kehidupan publik agar terbit suatu perdamaian. Banyak bentuk nasionalisme berlangsung dalam agama, dan sejak itu kekejaman demi kekejaman dilakukan atas nama alasan (*in the name of reason*), atas nama nasionalisme rasis atau atas nama Komunisme ateistik yang melampaui kekejian agama sebelumnya.

Lama sebelum Pencerahan berlangsung, ada permulaan cara berpikir masyarakat yang tidak lagi ingin mendasarkan tatanan publik (*public order*) pada agama. Christoph Meier meneliti asal-usul pemikiran ini di Yunani Kuno; dia menunjukkan bagaimana pada waktu itu sudah ada wawasan-wawasan di Aeschylus yang berhubungan erat dengan berbagai peristiwa politik pada masa itu dan karena itu

lebih realistik daripada teori politiknya Plato atau Aristoteles. Akan tetapi, dalam tragedi, dewa-dewi yang jiwanya dipenuhi rasa dendam menjadi damai dengan kondisi berikut:

Persahabatan (*philia*) di rumah dan bermusuhan di luar. Reprositas persahabatan dimaksudkan untuk menggantikan repositas pembunuhan. Tidak ada lagi musuh di rumah, tetapi terjadi permusuhan dengan orang luar (*outsiders*): pembagian baru antara kawan dan lawan terjadi berkenaan dengan polis (kota), suatu pergeseran dalam konstelasi kawan-lawan. Bagaimana polis ini menyatukan lawan dan kawan ini agar tidak menjadi bermusuhan.

Pandangan ini tidak sejalan dengan pengalaman Yunani kuno; pengalaman Yunani sedikit berubah bahkan pada sekarang ini. Tatanan pada masyarakat manusia tidak pernah *taken for granted*. Negara-negara selalu menjaga ketertiban dengan monopoli kekerasan-melalui para prajuritnya/tentara, sistem peradilan dan polisi-dan dalam situasi yang kritis, negara-negara itu mengadakan perang pada musuhnya atau membujuk musuhnya agar mau bersatu dengan penduduknya yang lebih baik. Karena itu, pengalaman setelah Pencerahan bahwa penekanan/ pengekangan agama dari kehidupan masyarakat tidak menghasilkan perdamaian yang lebih baik tidaklah mengejutkan. Masalahnya terletak di wilayah yang lebih dalam. Tetapi peran apa yang bisa dimainkan agama-agama dalam menghadapi fakta politik ini? Apakah pengaruh agama terbatas untuk memperkuat motif tindakan manusia yang tidak bergantung pada agama,

menurut arah agresivitas atau upaya untuk mewujudkan perdamaian?

2. Penahanan Kekerasan Agama

Mengenai latar belakang pengalaman panjang bahwa persatuan di antara umat manusia dapat diwujudkan dengan paling mudah dengan memberi mereka musuh bersama (*common enemy*), Rene Girard mengembangkan sebuah teori yang tepat tentang hubungan antara agama dan kekerasan. Menurut pandangan ini, agama masyarakat dan tatanan sosial menjadi milik bersama masyarakat suku kuno (sebelum terbentuknya negara). Karena manusia adalah makhluk bernalafsu, kekerasan tidak bisa diatasi dengan alasan/nalar semata. Tetapi kekerasan itu biasanya berkurang dengan sendirinya ~ dan inilah poin penting untuk Girard. Gangguan-gangguan dan agresi kolektif bisa berubah menjadi tindakan bersama untuk melawan satu kekuatan, dan perdamaian bisa diperoleh kembali dengan memakan korban (mekanisme kambing hitam). Proses ini berlangsung tidak kentara karena ketika timbul kekerasan, orang-orang kehilangan dirinya dalam proyeksi yang membingungkan dan ekstasi. Menurut cara inilah negara yang sakral muncul. Semua agresi kolektif terhadap satu korban dikumpulkan bersama, dan kemudian semua proyeksi tentang korban dikonsentrasikan. Karena itu, korban tampak bagi massa yang sedang dipenuhi euforia sebagai inkarnasi/perwujudan semua kejahatan, tetapi pada saat yang sama tampak sebagai pembawa penyelamatan yang 'ajaib', karena melalui pembunuhan terhadap satu korban yang tentu saja sangat sulit dijelaskan kepada mereka yang terlibat di dalamnya, maka agresi resiprokal menjadi sirna dan bahaya

dapat dihindari. Pengalaman massa yang saling berlawanan ~ kekerasan ekstatik dan perdamaian yang tiba-tiba ~ mentransformasi korban dan membuat korban tampak terkutuk dan pada saat yang sama memperoleh keuntungan, yaitu sakral/ suci.

Menurut pandangan ini, di masyarakat pra-negara (sebelum ada negara), agama masyarakat tidak berfungsi untuk mengatasi kekerasan tetapi untuk menahan kekerasan itu. Masyarakat didamaikan melalui pengalihan agresi keluar dan melalui pembagian antara yang sakral dan duniawi (*profane*). Teror sakral yang mensyaratkan adanya peringatan kembali akan bahaya masa lalu dimaksudkan untuk mencegah *inner sphere* (lingkungan sendiri) dari kembalinya ke ancaman dan untuk menjaga kesakralan, yaitu mengekang agresivitas yang keliru, melalui regulasi tabu. Disamping itu, dalam pengorbanan ritual, euforia (*original excitement*) dan pelepasannya dibangkitkan kembali secara teratur dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga bisa memiliki efek murninya.

Penahanan kekerasan agama (melalui mekanisme kambing-hitam, sakralisasi, regulasi tabu dan pengorbanan ritual) sangat penting artinya dalam masyarakat pra-negara. Hanya melalui cara inilah masyarakat yang belum memiliki otoritas dengan monopoli kekerasan dapat dicegah dari kehancuran. Tetapi dengan 'ditemukannya' negara, terjadi perubahan yang pasti, meskipun sebagian besar perubahan ini berlangsung secara *step-by-step*. Tanggung jawab atas ketertiban masyarakat sekarang diemban oleh otoritas/penguasa sentral, yang dapat menggunakan kekuatan menurut cara yang sah dan

harus menekan semua bentuk kekerasan. Meskipun oposisi antara kekerasan sakral dan kekerasan profan punya kedudukan sangat penting di masyarakat pra-negara, namun bagi negara, perbedaan etika dan politik antara kekuatan yang *legitimate* dan *illegitimate* menjadi paling signifikan. Menurut cara ini, agama-agama dibebaskan dari urusan ketertiban masyarakat secara langsung dan karena itu ~ dengan memanfaatkan pengalaman dari sifat ketuhanan ~ mampu berkembang secara mandiri. Pada saat yang sama, agama-agama umumnya menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan aura sakral kepada otoritas negara, yang memperkuat perbedaan antara kekerasan yang sah dan kekerasan yang tidak sah dan karena itu memerlukan tindakan kekerasan yang sah.

Meskipun Krishna menyuruh Arjuna berperang, Bhagawatgita tidak menyerukan berperang. Sebaliknya, masalah yang baru saja digambarkan ini menemukan ekspresi klasik di dalamnya. Bhagawatgita mengajak agar orang-orang bersatu dengan dunia ilahiah dan mencapai perdamaian yang sejati. Tetapi Bhagawatgita menganggap perang sebagai sesuatu yang tidak bisa dielakkan demi ketertiban masyarakat dan untuk menghukum orang-orang yang berbuat salah, dan karena itu kitab ini mengharapkan panglima perang (dan prajuritnya) melakukan pembedaan kedalam secara ekstrim (*inward distinction*). Mereka berperang untuk menjalankan tugas sosialnya, tetapi pada saat yang sama untuk membebaskan diri dari semua nafsu angkara. Mereka harus mengatasi hasrat yang bergolak dengan hebat demi mengharap kemenangan dan demi perasaan benci dan permusuhannya kepada para lawan dalam hati mereka. Perbedaan yang halus

antara tugas sosial dan tugas spiritual ini menghasilkan tuntutan yang tinggi dan superhuman, tetapi perbedaan demikian ditemukan dalam semua agama yang lebih universal. Misalnya, Israel sering diperingatkan dengan keras oleh para nabi agar mengharapkan penyelamatannya (*salvation*) bukan dari kekuatan militer tetapi hanya dari keyakinan mutlak kepada Yahweh (Yahudi), dan agar berperang dengan gagah berani. Akan tetapi, perbedaan antara tugas sosial dan tugas spiritual bisa saja menyesatkan dan menyebabkan banyak kesalahan. Bukannya mengatasi rasa benci dan permusuhan, dalam kasus tersebut, inspirasi agama cenderung menaikkan perasaan kebencian dan permusuhan ini, bahkan lebih tinggi. Karena itu, agama harus senantiasa menugaskan diri sendiri bagaimana ia mampu memerangi diri sendiri terhadap godaan-godaan tersebut dan perilaku yang bagaimana yang hendak ia serukan kepada para pemeluknya dalam situasi yang serba sulit dan kritis.

3. Memberikan Rasa Kasih-sayang dan Penanganan Kekerasan

Apakah agama-agama hanya berfungsi untuk membendung wabah kekerasan yang berbahaya sejauh mungkin melalui mekanisme sakral dan melalui perbedaan etika dan politik, atau adakah di dalamnya suatu kekuatan yang benar-benar membantu mengatasi kekuasaan yang destruktif? Ketika agresi punya pengaruh yang sangat besar pada emosi manusia dan pada saat yang sama berkaitan dengan perasaan beragama dan perjuangan seksual, masalah mengatasi kekerasan bahkan terus berlanjut ke wilayah tengah agama. Sehingga renungan berikut harus meninggalkan

sejarah dari perspektif agama dan secara khusus menuju ke pandangan agama Kristen.

Jesus sangat aktif dalam tradisi Yahudi, karena dengan adanya Yesus, tradisi Yahudi menjadi cukup menentukan bagi semua permusuhan yang kuat kepada Tuhan yang harus diatasi. Keyakinan kepada Yahudi mengenal dua cara dalam mencapai hal ini: penghancuran musuh dan/atau konversinya (cf. Zeph. 3.9f. Mal.1.11; Isa.60.1-5). Wawasan mendalam mengenai konversi ini diberikan dengan nyanyian Hamba (*Servant songs*), yang melalui berbagai peran dramatis menggambarkan bagaimana Tuhan mengilhami semua rakyat Israel atau seorang Nabi untuk berperilaku lain dalam menghadapi bahaya yang mengancam dan memulai proses yang melibatkan lainnya. Dalam nyanyian yang pertama, Tuhan berfirman/bersabda sendiri dan menyatakan bahwa Dia memberikan semangat kepada abadinya, sehingga dia bekerja tanpa lelah, tidak menangis, tidak merasa sakit dan tidak mengeluh (Isa. 42.1-4). Kemudian, hamba berkata pada diri sendiri dan mengakui bahwa Tuhan maha berdiri sendiri dan maha mendengar segala sesuatu sehingga hamba tidak mampu mempertahankan diri dan menyerahkan diri kepada musuh (Isa.50.4-6), Akhirnya, orang-orang berbicara siapa yang mengamati hamba dan mengalami perubahan. Pertama mereka berpikir bahwa Tuhan sendiri mencintai hambanya yang putus asa (Isa 53.4). Tetapi kemudian mereka menyaksikan perilaku aneh hamba, yang bisu seperti domba yang disembelih, dan melalui konversi mereka memperoleh perspektif yang benar-benar baru. Sekarang mereka menemukan bahwa kekerasan terhadap hamba/abdi bukan berasal dari Tuhan tetapi berasal dari umat manusia sendiri

(Isa.53.5-7). Mata mereka ~ seperti mata kawan Job ~ mula-mula dibutakan oleh teologi suci lama yang menurutnya kekerasan terhadap korban yang melanggar ketertiban masyarakat merupakan kekerasan ilahiah (*divine violence*). Akan tetapi, setelah konversi mereka, akhirnya mereka mengakui bahwa segala sesuatunya sangat berbeda. Mereka menyerahkan dosanya kepada Tuhan dan memikirkan kekerasan ilahiah bilamana mereka dan lainnya melakukan agresinya. Bagi mereka, konversi bukan semata soal etika tetapi menyebabkan mereka mengubah seluruh pandangan dunianya.

Jesus menjalani nasib/takdir yang memiliki persamaan dengan nasib hamba yang terpilih dan disayangi. Seperti hamba itu, yang paling penting bagi dia, telinganya, seluruh kesadarannya terbuka pada hal baru; dia merasakan aura napas lahiah dan mendengar kata-kata cinta yang menganggap dia sebagai anak laki-laki (Mark.1.9-11). Berkat pengalaman ini, dia menjadi mampu menyembuhkan dan membebaskan orang-orang yang dipenjara oleh kekuasaan yang penuh kekerasan (Mark 5.1.-17; 9.14-29). Dia menyatakan begitu dekatnya Tuhan yang mengampuni musuhnya, para pendosa, dengan mengasihi mereka dulu, dan mengundang mereka ke jamuan bersama. Menurut keterangan ilahiah ini, dia menyeruhkan para pendengarnya agar membalas kejahatan dengan kebaikan: mencintai para musuhnya dan berbuat baik kepada mereka, sebagaimana Tuhan telah menerbitkan sinar terang demi kebaikan (*good*) dan kejahatan (*evil*) (Matt.5.43-48). Mereka harus menetralkan dan menguasai semua pendekatan pada kejahatan dengan tindakan-tindakan yang menakjudkan: 'Tetapi jika seorang

memukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu; dan jika seorang menuntut kamu dan meminta bajumu, biarkan dia mengambil jasmu' (Matt.5.39). Bilamana perilaku demikian diperluas, kekerasan akan teratasi sampai ke akar-akarnya, dan masyarakat yang damai dan berkeadilan, kerajaan Tuhan di muka bumi, akan mulai berkembang dengan baik.

Akan tetapi, meskipun ada kekuatan penyembuhan dan pembebasan, kegiatan Jesus menimbulkan perlawanan. Pertama, semua lawan-lawannya berusaha memasang banyak jebakan untuknya (masalah pajak, para wanita yang berzina, dll). Dengan imajinasi kreatifnya, Jesus menemukan jalan keluar yang mengejutkan untuk mengatasi situasi kritis, dan dia mampu membuat berbagai masalah membahayakan yang semua menimpa dirinya sekarang mendera para musuhnya dalam bentuk peringatan. Meski demikian, reaksi superior dan kreatif Jesus justru memperkeras perlawanan, dan hal ini menyebabkan dia membalas lawan-lawannya dengan pernyataan keputusan (*proclamation of judgement*). Dia menunjukkan betapa hebat kekuatan kebohongan dan kekerasan menimpa orang-orang dan memperlihatkan akibatnya. Tetapi dalam melakukan hal ini pada saat yang sama pernyataan keputusan tersebut menjadi tidak jelas. Apakah pesan Jesus perihal kebajikan sebelumnya sebagai salah satu sisi dari dua citra Tuhan, sebagaimana citra yang diperlihatkan oleh perumpamaan keputusannya, atau apakah dia memahami keputusan menurut cara yang sangat berbeda, sebagaimana diperlihatkan oleh banyak keterangan yang halus, yaitu pengungkapan proses yang dengan proses ini orang-orang menilai orang lainnya dan sehingga melanjutkan spiral kekerasan tiada akhir?

Pernyataan keputusan ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan, karena ia tidak menghasut orang-orang tetapi menghasilkan konflik tanpa akhir. Pernyataan keputusan itu memprovokasi lawan-lawan Yesus untuk membuka kekerasan dan memaksa Yesus agar mengambil pendapat yang tegas: apakah dia akan meminta Tuhan agar menghukum para musuhnya dengan kekuatan atau apakah dia mengikuti jalannya keputusan tersebut hingga akhir. Dia memberikan jawaban dengan sedikit kata-kata dan dengan lebih banyak tindakan. Dia tidak membalas kekerasan itu, atau juga tidak meminta agar Tuhan membalas kekerasan tersebut, sebagaimana yang diminta oleh Jeremia dalam situasi serupa (Jer.15.15). Dalam doanya kepada Tuhan dan dalam perjuangannya dengan derita yang mendalam atas kematiannya sendiri, dia meradikalisasi atau memperkeras pesannya perihal keunggulan kebajikan sehingga pesan itu menjadi dipraktekkan dalam wujud non-kekerasan tanpa syarat: di palang salib dia berdoa untuk musuh-musuhnya dan kemudian mentransformasi agresi mematikan yang menyimpannya menjadi cinta-kasih. Dalam melakukan hal ini, dia mentransformasikan semua gagasan pengorbanan kuno menjadi pengorbanan yang benar-benar baru. Dia mampu melakukan hal ini karena Tuhan telah membisiki telinganya setiap hari dan karena dia telah mengalami hal ini sebagaimana Tuhan kehidupan dan kematian dapat membangkitkan kehidupan yang baru.

'Mengorbankan' kehidupan seseorang dalam memerangi dan membenci musuh tidak memerlukan begitu banyak kekuatan manusia, sebagaimana yang terjadi pada peperangan. Tetapi apakah kita sebagai manusia punya

kekuatan untuk mengambil jalan cinta-kasih dalam menghadapi kekerasan langsung? Para pengikut Yesus mengupayakan jalan cinta-kasih ini dan pada mulanya gagal. Meskipun mereka dekat dengan Yesus, ada banyak hal yang belum mereka pahami pada diri Yesus, dan pada saat yang kritis, mereka merasa sangat takut dengan manusia lain, yaitu sesama umat Yesus. Dunia kegelisahan/ketakutan dan mekanisme kekerasan yang cepat menular lebih kuat dibanding kemauan kebajikan mereka dan mendorong mereka menjadi penghianat. Perilaku yang sangat berbeda dari perilaku Yesus menimbulkan banyak kerugian, tetapi pada saat yang sama menyebabkan mereka mencurahkan air mata kesedihan (cf. Matt.26.75). Mereka dibebaskan dari perasaan frustrasi dan putus asa ini dengan kebangkitan Yesus. Perdamaian *Easter* dan pengampunan atas kurang kuatnya iman mereka dijanjikan kepada semua orang yang telah gagal.

Tuhan yang menyingkapkan wujud dirinya dalam bentuk Yesus dan para muridnya menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang membalas kejahatan (*evil*) dengan kebajikan (*good*). Bahkan dalam menghadapi kekerasan yang amat menyakitkan, Dia mengilhami Yesus untuk bertindak tanpa kekerasan, dan dalam menghadapi penghianatan yang terang-terangan, dia mengampuni para murid Yesus dan memberikan kedamaian kepadanya melalui kebangkitan Yesus. Pada saat yang sama, hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa penyelesaian kekerasan bukan terletak pada besarnya kekuatan manusia. Yesus mampu menempuh jalan ini hanya dengan mendengar dan mendengar firman Tuhan Bapanya, dan para muridnya menyaksikan bagaimana ancaman kekerasan dan ketakutan jauh lebih kuat dibanding perbuatan baik mereka dan hanya

pengampunan Tuhan-lah yang membuka masa depan mereka. Karena itu, dari perspektif agama Kristen ini, tidak ada etika untuk mengatasi kekerasan yang dapat menunjukkan subjek yang otonom. Hanya dengan cahaya dan dalam kekuasaan ruh Pantekosta, yang dimaksudkan untuk membuka telinga kita dan hati kita setiap hari, kita akan mampu mengatasi kekuatan/kekerasan yang destruktif. Di sini kita harus dibimbing dengan jalan Yesus dan pengalaman para muridnya. Kedua jalan ini ~ teladan Yesus dan gambaran kelemahan kita ~ dapat menunjukkan kepada kita bagaimana dalam kekuasaan ruh ilahiah, dunia kekerasan yang hebat dengan kekuatannya, yang tidak saja menakutkan tetapi menyeramkan, dapat diterangkan dan dikuasai dengan baik. Untuk itu, kita memerlukan jalan di masyarakat yang orang-orangnya ingin mencapai tujuan yang sama, dan dengan cinta-kasih dan pengampunan, kita akan memiliki pengalaman konkrit berupa cinta-kasih ilahiah. Apakah cinta-kasih dan ruh Pantekosta ini betul-betul efektif di masyarakat dapat dilihat dari apakah orang-orang dikumpulkan dan disatukan melalui pemberian maaf dan penyesalan/tobat dan tidak lagi melalui polarisasi atau pembentukan kubu-kubu diantara musuh. Jika hal ini terjadi, maka pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan gelap kekerasan kolektif akan diungkapkan yang selama ini disembunyikan di bawah tudung sakral sejak permulaan umat manusia (cf. Matt 13.35), dan kelompok anusia mampu bertahan hidup melalui polarisasi di antara para lawan.

4. Etika Untuk Mereduksi Kekerasan

Jika menurut pandangan agama Kristen, kekerasan dapat diatasi hanya dengan bimbingan ruh ilahiah (*divine spirit*)

di sebuah masyarakat yang penduduknya beriman, maka muncul pertanyaan lebih lanjut apakah setidaknya ada suatu etika yang universal untuk mereduksi kekerasan di lingkungan publik dan politik. Merenungkan sejarah dapat melempangkan jawaban atas pertanyaan ini.

Jesus tidak pernah mengklaim punya kekuasaan politik, dan dia tampaknya menganggap politik sebagai hal yang *taken for granted*, yaitu para penguasa menindas rakyat mereka dan yang kuat kuat menyalahgunakan kekuasaannya (Matt.20.25). Menurut *Gospel of John*, dia menjelaskan kepada Pilate bagaimana kerajaan yang ingin dia dirikan sangat berbeda sifatnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak punya abdi untuk memperjuangkan dirinya (John 18.36). Tetapi pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa Pilate punya kekuasaan dari atas.

Masyarakat setelah *Easter* senantiasa mengikuti jalan ini. Masyarakat menahan diri dari kekuasaan politik tetapi mengakui bahwa otoritas negara merupakan pengabdian kepada Tuhan (Rom.13.1-7) - walaupun caranya tentu sangat berbeda dari masyarakat beriman. Karena hal ini merupakan jenis pengabdian tak langsung, maka masyarakat pada mulanya tidak mengembangkan program politik khusus untuk negara dan perbaikan dunia, tetapi berharap bahwa kekerasan yang terjadi di dunia ini segera berakhir (I Cor.7.31). Meski demikian, dengan pernyataan yang dibuatnya, maka tuntutan publik kemudian mengalami konflik dengan otoritas politik. Dalam krisis ini, banyak orang beriman menunjukkan bahwa, seperti Jesus, dalam keyakinannya kepada Tuhan, mereka siap

dan mau mengikuti jalan non-kekerasan untuk mencapai tujuan sebagai shahid/syuhada/martir.

Tuntutan publik/masyarakat juga membuat gereja secara bertahap mengadopsi tanggung jawab publiknya sendiri. Karena itu, pergeseran di bawah Constantine tidak melahirkan hasil yang dikehendaki, meskipun pergeseran itu banyak mengubah sifat-sifat Constantine. Karena para penganut Kristen dalam jabatan politik sekarang menggunakan kekerasan untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan karena perbedaan antara gereja dan negara selama ini tidak terlihat cukup jelas, meskipun perbedaan itu selalu dikedepankan, gagasan-gagasan baru dengan cepat bermunculan meskipun kenyataannya gagasan itu sudah lama. Sebuah teologi politik muncul dari teks Perjanjian Lama tentang keputusan dan kemarahan Tuhan, dari Perjanjian Baru perihal citra keputusan yang dipahami terlepas dari cara Yesus, dan dari kepentingan politik untuk menggunakan kekerasan. Dalam teologi ini, dinamika internal jalan Yesus sangat dilingkupi dan disembunyikan oleh konsepsi sakral lama. Sekali lagi, perbedaan etika dan politik antara kekerasan yang *legitimate* dan *illegitimate* berlangsung menjadi sangat signifikan; disini, kepentingan gereja sering membantu mendefinisikan apa yang *legitimate* dan apa yang tidak. Kiranya amat sulit menilai apakah menurut cara ini ada reduksi kekerasan yang nyata dalam sejarah umat Kristen atau apakah bauran kepentingan gereja dan negara tidak memiliki efek berlawanan; pertanyaan demikian tetap terbuka.

Penilaian kekerasan secara kritis dan modern menjadi sangat penting artinya melalui masalah apa yang

legitimate dan yang tidak *legitimate*. Peperangan di antara agama jelas menunjukkan bagaimana keputusan (*judgement*) ini umumnya bergantung pada prasangka seseorang, dan peperangan lain di antara negara-negara yang beragama Kristen juga bernuansa prasangka. Perkembangan persenjataan modern selanjutnya menghasilkan pengalaman baru, perihal betapa berbahaya dan merusaknya jika kita menggunakan kekuatan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah kekerasan yang destruktif dapat diatasi dengan memadai.

Dalam karyanya *On Eternal Peace* (1795), dalam memandang eskalasi kekerasan dalam Revolusi Perancis, Kant mengandalkan semangat dagang untuk mencapai perdamaian yang lebih baik antara individu perorangan dan orang-orang umumnya. Dalam melakukan hal ini, dia menggunakan sebuah gagasan yang banyak menarik moralist Skotlandia dan pendiri ekonomi politik (Adam Smith, dsb.). Pasar dunia kenyataannya berperan penting dalam soal kekerasan. Diilhami oleh teori Girard, P.Dumouchel dan J.-P. Dupuy mendemonstrasikan hubungan yang tegas antara penahanan kekerasan secara sakral di masyarakat pra-negara dan penahanan kekerasan melalui ekonomi pasar di dunia antar-negara modern. Seperti halnya sesuatu yang sakral berakar dari sesuatu kolektif dan berdiri berdasarkan kekuatan yang ada, demikian juga, harga timbul dari interaksi-interaksi di ekonomi pasar dan para mitra yang ada sedemikian rupa sehingga harga itu menentukan keputusan dan dapat mencegah konflik kekerasan. Walaupun dalam dunia jaman dulu, korban yang mula-mula profan disakralisasi, maka perekonomian pasar modern tidak bertanggung jawab atas

berbagai korban. Tetapi di kedua kasus ini, kita selalu punya sebuah sistem yang memakan korban dan pada saat yang bersamaan membatasi kekerasan: pasar mengekang kekerasan. Bahwa perbandingan antara perekonomian pasar modern dan dunia sakral yang lama menyentuh sebuah titik tertentu juga terbukti dari kecenderungan ke arah mitologikal dalam media modern, yang pada dasarnya milik dunia pasar. Dalam sebuah edisi McLuhan *Understanding Media*, L.Lapham menulis: "Imajinasi posmo modern merupakan produk dari media massa, tetapi sebagai sarana persepsi, imajinasi itu lebih tepat digambarkan sebagai *Pre-Christian* (sebelum ada Kristen).... Sebagaimana dikatakan 30 tahun lampau, percepatan teknologi elektronik membawa kita ke keadaan terbelakang, yaitu cahaya api yang berkelip-kelip di gua jaman neolitik lampau. Periklanan, yang semakin menjadi ciri ritual sakral, juga ada di dunia jaman modern dan jaman neolitik (jaman batu muda).

Apa yang sama-sama dimiliki oleh masyarakat pranegara dan dunia internasional modern, yaitu kedua tidak mengenal otoritas sentral yang dapat membentuk kehidupan publik berdasarkan keputusan musyawarah. Proses penataan diri (*self-organization*) yang melibatkan kekerasan menciptakan suatu ketertiban baik dengan cara menahan kekerasan maupun dengan menyamakan kegiatannya. Dalam dunia demikian, tidak ada tempat yang independen dan sistematis untuk etika politik. Diperlukan etika minimal untuk berfungsinya sistem secara keseluruhan. Setidaknya ada tempat untuk upaya etika yang berkesadaran guna mereduksi kekerasan di ceruk masyarakat tersebut yang tidak langsung terkena tekanan mekanisme internasional.

Situasi ini akan berbeda, dan keputusan etika untuk reduksi kekerasan secara menyeluruh sekali lagi mungkin saja, jika ada otoritas internasional yang dapat menetapkan keputusan baik yang bersangkutan dengan pasar dunia maupun dengan pihak-pihak regional yang berkonflik. Jadi, etika pereduksian kekerasan harus bekerja untuk otoritas dunia dengan monopoli kekerasan. Meski demikian, bukan hanya tradisi banyak budaya menentang hal ini tetapi juga ada ketakutan yang amat sangat dalam dunia kita yaitu kekerasan yang terbuka tetapi jauh lebih terstruktur dengan baik.

Konsekuensinya, etika pereduksian kekerasan menghadapi pertanyaan yang pasti apakah risiko demikian harus diambil. Jawaban atas pertanyaan ini lebih penting daripada etika dan sekali lagi mengarah ke wilayah penting agama. Keputusan yang berisiko mengenai ketertiban seluruh dunia dapat diambil hanya berdasarkan pandangan seluruh dunia. Dari sudut pandang agama Kristen, terdapat banyak alasan untuk memikirkan pengambilan risiko itu. Untuk keyakinan, jelas dunia kita tidak akan pernah sempurna, dan komunitas keyakinan/keimanan juga sudah cukup pasti ia mampu memberikan perlawanan pada tekanan terbuka atau tekanan halus dari ideologi totaliter bahkan dalam dunia yang politiknya lebih seragam, dan pola penyelesaian kekerasan dalam keyakinan akan selalu punya dampak pada masyarakat. Tetapi tidak ada kepastian dalam hal pertanyaan ini berkaitan dengan masa depan. Konsekuensinya, masalah kekerasan memberi kita gambaran yang sangat jelas bahwa kemanusiaan tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Kemanusiaan diserahkan kepada kekuasaan yang sebagian besar berasal dari kemanusiaan itu sendiri tetapi pada saat yang sama

kemanusiaan terlalu banyak ditanyakan. Hanya dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa sajalah, kita akan mampu melihat dengan jernih semua ancaman kekerasan.